

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI *FRAUD HEXAGON* DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Oleh

Elis Fitriyani

Korupsi pada kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang menghambat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Data KPK dan ICW menunjukkan peningkatan kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian serta pengawasan internal di sektor publik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi pada K/L di Indonesia dengan menggunakan teori *fraud hexagon*, yang meliputi tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *fraud hexagon* dan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan peluang, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi pada K/L di Indonesia. Pada pengujian moderasi, SPIP tidak mampu memperlemah sebagian besar hubungan antara elemen *fraud hexagon* dan korupsi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menggunakan teori *fraud hexagon* pada konteks korupsi sektor publik dengan unit analisis K/L, yang sebelumnya masih sangat terbatas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, meningkatkan kualitas pengawasan internal melalui penguatan kapabilitas APIP, serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Fraud Hexagon*, Korupsi, Kementerian/Lembaga, SPIP, APIP, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

FACTORS AFFECTING CORRUPTION IN MINISTRIES/INSTITUTIONS IN INDONESIA BASED ON THE FRAUD HEXAGON THEORY WITH GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEMS AS MODERATING VARIABLES

By

Elis Fitriyani

Corruption in ministries/institutions in Indonesia remains a serious problem that hinders effective, efficient, and accountable governance. Data from the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian Corruption Watch (ICW) show an increase in corruption cases in recent years, indicating weaknesses in internal control and supervision in the public sector. This study was conducted to analyze the factors that influence corruption in ministries/institutions in Indonesia using the fraud hexagon theory, which includes pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, and collusion. In addition, this study also examines the role of the Government Internal Control System (SPIP) as a moderating variable in the relationship between the fraud hexagon and corruption. The results show that pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, and collusion have a significant effect on corruption in Indonesian ministries/agencies. In the moderation test, SPIP is unable to weaken most of the relationships between the elements of the fraud hexagon and corruption. This study provides empirical contributions by using the fraud hexagon theory in the context of public sector corruption with ministries/institutions as the unit of analysis, which has previously been very limited. The results of this study are expected to provide input for the government in evaluating the effectiveness of SPIP implementation, improving the quality of internal supervision by strengthening APIP capabilities, and formulating more targeted policies in the effort to eradicate corruption.

Keywords: Fraud Hexagon, Corruption, Ministries/Agencies, SPIP, APIP, Governance.